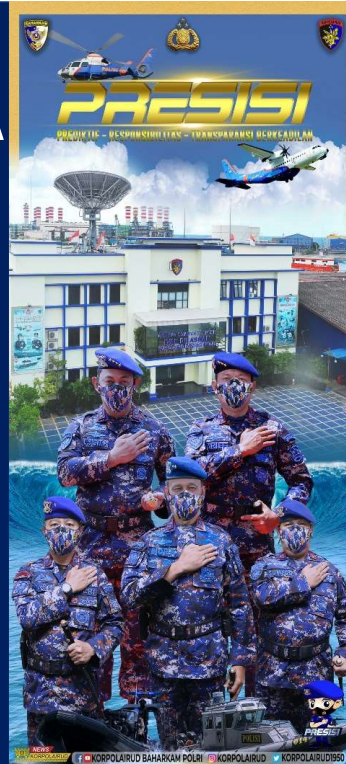


**PROPER
PROYEK PERUBAHAN**

KOLABORASI INTELIJEN UNTUK MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOBA DALAM MENJAGA HARKAMTIBMAS DI WILAYAH PERAIRAN



**SURATNO
NRP : 76030906
NOSIS : 20240707012328
INSTANSI : POLRI**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II
ANGKATAN XXXI
PUSDIKMIN TAHUN 2024**

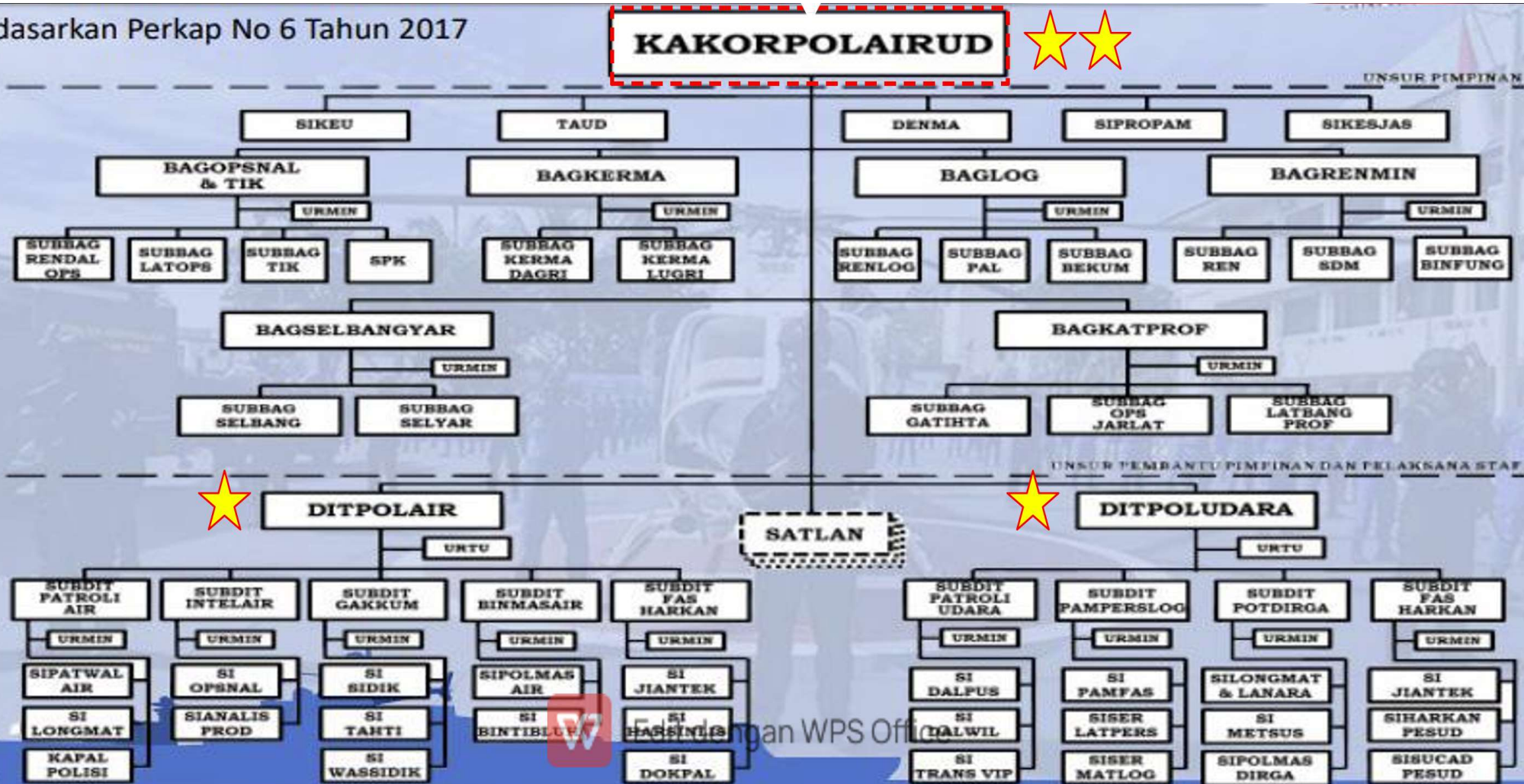




STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2017



WPS Office



DESKRIPSI PROPER



Kolaborasi Intelijen Untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba Dalam Menjaga HarkamTibmas Wilayah Perairan merupakan bentuk Kerjasama di lingkungan Wilayah Perairan untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari penyelundupan Narkoba khususnya di Wilayah Perairan di Indonesia.

Rencana kegiatan;

1. *Pembentukan Team Efektif*
2. *Menganalisa Kebijakan Ditpolair tentang Pengamanan Wilayah Perairan;*
3. Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder;
4. Penyusunan Draft Standar Operational Prosedur ;
5. Melakukan FGD dengan Stakeholder;
6. Melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Intelijen di Korpolaairud
7. *Melakukan Penyusunan Draft PKS antar Stakeholder.*

Manfaat :

1. Menciptakan Sinergitas dalam Penanganan Harkamtibmas di Perairan
2. Menciptakan Integrasi data dan informasi dalam menjaga Harkamtibmas
3. Memberikan rasa aman Bagi masyarakat pesisir pantai dan nelayan
4. Wilayah Perairan terjamin pengamanan dari Penyelundupan Narkoba



LATAR BELAKANG (1)



Arahan Presiden



- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- EFISIENSI & EFEKTIVITAS
- TRANSFORMASI ORGANISASI POLRI
- TINDAKAN PENINDAKAN KORUPSI

Transformasi Pelayanan Publik

- EFISIENSI & EFEKTIVITAS
- KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT

Presisi Polri



- TRANSFORMASI ORGANISASI
- TRANSFORMASI OPERASIONAL
- TRANSFORMASI PELAYAN PUBLIK
- TRANSFORMASI PENGAWASAN



Kejahatan Di Wilayah Perairan

- MASSIF & TERORGANISIR
- PENEGAKKAN HUKUM MASIH LEMAH
- SEMAKIN CANGGIH & TERSTRUKTUR

Tindak Pidana Pelanggaran Illegal Perairan

- PENYELUNDUPAN NARKOBA

Etika Integritas

- POTENSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
- TINDAKAN ILLEGAL KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK

80 PERSEN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI INDONESIA GUNAKAN JALUR LAUT

“Poli akan terus memperkuat kerja internasional seperti yang kita lakukan di Eropa. Kita juga akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. Kita akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. Kita akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga.”

IRJEN ARMAN DEPURI

LAUT MENJADI PILIHAN JALUR PENYELUNDUPAN

Badan Narkotika Nasional memperbaharui jalur laut menjadi jalur utama narkoba paling dominan. Jalur yang tersebut melibatkan perantara karena para pedagang ilegal ini berupaya mencari keuntungan yang maksimal.

80%

Penyelundupan Narkoba di Indonesia menggunakan jalur laut

dibalik FAKTA GEOGRAFIS

Kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat melakukan penyelundupan Narkoba dari Luar Negeri

Pemberantasan narkoba pada 2023

Kepolisian Republik Indonesia (Poli) mencatat sebanyak 79,7 persen kejahatan terkait narkoba diselesaikan pada tahun lalu. Berikut catatan kinerja Poli dalam memberantas narkoba sepanjang 2023.

Penyelesaian 31.415 (79,7%)

Jumlah kejahatan 39.389 (Data Poli, 27 Desember 2023)

Jumlah jiwa yang terselamatkan 35,7 juta jiwa

PEMBERANTASAN KASUS NARKOBA 2022

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sebanyak 851 kasus narkoba ditangkap dan 1.250 tersangka ditangkap sepanjang 2022 sebagai upaya memberantas peredaran narkoba di Tanah Air sekaligus menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Tersangka dan Jumlah Kasus (Data BNN, 31 Desember 2022)

Tersangka **1.350**

Kasus **851**

Jaringan nasional **26**

Internasional **26**

Barang sitaan

Data Poli, 27 Desember 2023

- Sabu **6,1 ton**
- Ekstasi **1,5 juta butir**
- Ganja **7,5 ton**
- Pohon ganja **22.026 batang**
- Hercin **0,36 gram**
- Kokain **11,5 kg**
- Tembaku goris **105 kg**

Konversi barang bukti dalam rupiah: **Rp12,87 triliun**

Kasus yang menonjol

Data Poli, 27 Desember 2023

Di antaranya:

- Tangkap penyelundupan: **28 Januari 2023**
- Tempat kejadian perkara (TKP): **22 Februari 2023**
- Perairan Kuala Teupin, Aceh: **3 orang**
- Wisma Selat Malaka, Aceh: **2 orang**
- Perairan Ikan Kiran, Aceh: **3 orang**
- Barang bukti: **149 kg sabu** dan **200 kg sabu**
- Barang bukti: **348 kg sabu**

Upaya Poli memberantas narkoba

- Membentuk satuan tugas Penanggulangan Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GNG) untuk penindakan.
- Menggelor operasi dengan melibatkan kepolisian negara lain untuk memutus peredaran narkoba di wilayah perbatasan.
- Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk mengungkap jaringan narkoba internasional.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Kepala Poli

BARANG BUKTI

Sabu	1,9 ton	Ganja	1,06 ton	Pili ekstasi	262.789 butir
Serbuk ekstasi	16,5 kg	Ganja basah	152,6 ton	Ladang ganja	63,9 ha

(dimusnahkan)

KASUS TPPU PERKARA NARKOBA

Jumlah: **17 kasus**

Tersangka: **20 orang**

Penyitaan aset: **Rp33,8 miliar**

TPPU: Tidak Pidana Penjualan Dang

STRATEGI BNN

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus narkoba.
- Memberikan edukasi kepada para remaja terkait bahaya narkoba.
- Memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat.
- Memperluas kerja sama dengan berbagai instansi internasional.
- Menerapkan teknologi informasi dalam pemberantasan narkoba.
- Meningkatkan layanan rehabilitasi.

“Pemberantasan ini telah menyelamatkan 12,2 juta generasi bangsa dari potensi penyalahgunaan narkoba.”

Petrus Reinhard Golose
Kepala BNN

Memerangi penyalahgunaan narkoba pada generasi muda

Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan membantas peredaran zat terlarang tersebut lewat aksi pencegahan dan penindakan.

Faktor penyalahgunaan oleh generasi muda

- Kecenderungan mengikuti teman dan rasa keingintahuan yang tinggi.
- Pola asuh dan interaksi orang tua-anak kurang dekat.
- Penggunaan beragam platform komunikasi oleh bandar narkoba untuk menjangkau anak muda.

Tujuan memerangi penyalahgunaan narkoba

- Menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba, seperti gangguan kesehatan dan kematian.
- Mendukung generasi muda memiliki hidup berkualitas.

Aksi pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba

- Melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba melibatkan orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Memperbanyak fasilitas layanan rehabilitasi untuk membantu penyalahgunaan lepas dari ketergantungan.
- Melakukan pemusnahan narkoba dan bahan pembuat narkoba.
- Menindak tegas para tersangka sindikat jaringan narkoba.
- Melakukan kampanye antinarkoba ke sekolah.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba usia muda 2023

Data BNN 3 Februari 2024

Persentase: **24,1%**

Jumlah: **804.437**

Total jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia: **3.337.911**

Keterangan: Data menunjukkan prevalensi pada kelompok usia 15-24 tahun, angka merupakan hasil pembulatan

“Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pemuda harus menjadi perhatian sebab mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan akan menjemput cita-cita Indonesia emas tahun 2045.”

Irjen Pol Marthinus Hukum
Kepala BNN

Badan Pusat Statistik

Badan Narkotika Nasional

Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (Setahun Pakai) Tahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi (%)
2019	1,80
2021	1,95
2023	1,73

Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (Pernah Pakai) Tahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi (%)
2019	2,40
2021	2,57
2023	2,20

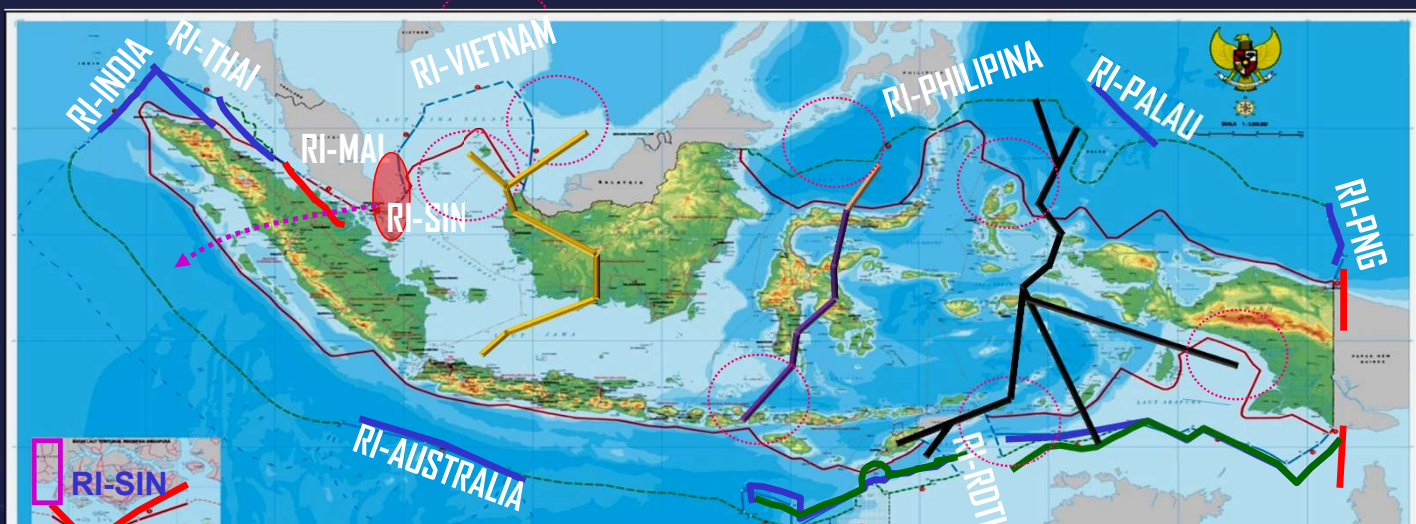
Pada tahun 2023, terdapat penurunan sekitar **300 ribu jiwa** penduduk Indonesia umur 15-64 tahun yang terpapar narkoba (setahun pakai) dibandingkan tahun 2021.

Sumber: Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2023

bos.go.id

Peredaran Narkoba **80** persen lewat Jalur Laut

WILAYAH LAUT INDONESIA



- ❑ LUAS WIL YURNAS : 7,8 JT KM².
- ❑ PANJANG GRS PANTAI : 99.093 KM.
- ❑ JUMLAH PULAU : ± 13.466 PULAU
- ❑ PULAU TERDEPAN : 92 PULAU
- ❑ LUAS LAUT YURNAS : 5,9 JT KM².
 - LAUT NUSANTARA : 2,9 JT KM²
 - LAUT TERITORIAL : 0,3 JT KM²
 - ZEE : 2,7 JT KM²
- ❑ LUAS DARATAN : 1,9 JT KM².

	Batas Laut Teritorial		ALKI I
	Batas Landas Kontinen		ALKI II
	Batas Zona Ekonomi Eksklusif		ALKI III

DIBUTUHKAN KERJASAMA EFEKTIF DALAM MENJAGA HARKAMBTIBMAS PERAIRAN DARI PENYEKUNDUPAN NARKOBA

GIAT GAKKUM KORPOLAIRUD

NO	JENIS KEJAHATAN	2021		2022		2023	
		MABES	POLDA	MABES	POLDA	MABES	POLDA
	PSYKOTROPIKA (NARKOBA)	25	65	22	52	12	72



ANALISA SOAR



INTERNAL/ EKSTERNAL

ASPRATION (A)

1. Dukungan pemerintah Untuk Transformasi Sistem Pelayanan Publik
2. Kerjasama Kolaborasi dan Publik dalam mendukung Pembangunan Nasional

RESULT (R)

1. Wilayah Perairan Bebas dari penyelundupan Narkoba
2. Terlaksananya Kolaborasi dalam Harkamtibmas Wilayah Perairan di Indonesia

STRENGHT(S)

1. Program prioritas Kapolri (Presisi).
2. Dukungan Korpolaairud Polri Dalam Harkamtibmas Wilayah Perairan
3. Adanya Mou dan Perjanjian Kerjasama Polri dengan negara lain Untuk keamanan Wilayah Perbatasan
4. Sarana dan prasarana yang mendukung.

STRATEGY (SA)

1. Melakukan Langkah Strategis dalam penindakan Tindakan Illegal Penyelundupan Narkoba
2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait dalam menjaga Harkamtibmas

STRATEGY (SR)

1. Peran Ditpolair Korpoairud harus di optimalkan untuk menjangkau kemungkinan terjadinya tindakan ilegal di di wilayah perairan
2. Melakukan Kolaborasi Kerjasama Intelijen Dalam Deteksi Dini Penyelundupan Narkoba

OPPORTUNITY(O)

1. Revolusi Industri 4.0 Mendorong Sistem berbasis Digital dan Kerjasama Strategis
2. Dorongan Pemerintah Untuk Kerjasama & Kolaborasi dalam mendukung harkamtibnas di wilayah perairan

STRATEGY (OA)

1. Pemanfaatan Inovasi sistem dalam integrasi tugas dan fungsi Harkamtibmas Wilayah Perairan
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dari wilayah perairan

STRATEGY (OR)

1. Mengembangkan PKS & dalam bentuk kegiatan bersama yang terintegrasi , membuat SOP serta pelatihan kompetensi SDM (Transfer knowledge) antar Stakeholder Harkamtibmas di Bidang Intelijen.
2. Kolaborasi Antar Stakehokder dalam Intelijen Penyelundupan narkoba di Wilayah Perairan



ANALISA GAP



KONDISI SAAT INI

1. Belum Optimalnya Peran Korpoalirud Dalam Menjaga Harkamtibmas DI Wilayah Perairan terkait lundup narkotika
2. Stakeholder Wilayah Perairan belum kolaborasi dalam bidang intelijen
3. Wilayah perairan rawan atas jalur penyelundupan Narkoba
4. Indonesia belum optimal dalam memberantas Narkoba di wilayah perairan.
5. Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan terdampak akibat Penyelundupan Narkoba

SOLUSI INOVATIF

1. Analisis Kebijakan
2. Audiensi & FGD
3. PKS Dengan Stakeholder
4. Pembinaan & Pelatihan Antar Intelijen
5. Pusat Koordinasi

KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalnya Peran Korpoalirud Dalam Menjaga Harkamtibmas DI Wilayah Perairan
2. Stakeholder Wilayah Perairan menjalin kolaborasi dalam bidang intelijen
3. Wilayah perairan terhindar atas jalur penyelundupan Narkoba
4. Indonesia menjadi optimal dalam memberantas Narkoba di wilayah perairan.
5. Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan tidak terdampak akibat Penyelundupan Narkoba



TUJUAN PROPER



JANGKA PENDEK

1. Menganalisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan
2. Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder
3. Melakukan FGD dengan Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan Narkoba
4. Melakukan Penyusunan Draft PKS antar Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan narkoba
5. Penyusunan Draf Standar Operational Prosedur Untuk Skema koordinasi Antar Intelijen
6. Melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Intelijen di Korpolaairud

2 BULAN

JANGKA MENENGAH

1. Melaksanakan Pelatihan Kompetensi SDM Di Bidang Intelijen antar Stakeholder di Korpolaairud
2. Melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Intelijen di Dirpoirud Seluruh Indonesia
3. Melaksanakan Pengesahan SOP & PKS Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan narkba
4. Melaksanakan Pembentukan Posko Koordinasi Antar Stakeholder di Korpolaairud
5. Patroli Bersama antar Stakeholder di Bidang Intelijen Wilayah Perairan Jakarta

6 BULAN

JANGKA PANJANG

1. Melaksanakan PKS antar Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen antar Stakeholder di Wilayah Dirpolairud Seluruh Indonesia
2. Melaksanakan Pembentukan Posko Koordinasi Antar Stakeholder di Dirpolairud Seluruh Indonesia
3. Patroli Bersama antar Stakeholder di Bidang Intelijen Di Seluruh Perairan wilayah Indonesia
4. Analisis & Evaluasi Kerjasama Bidang Intelijen untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba.

1 – 2 TAHUN



MANFAAT



POLRI

PEMERINTAH

MASYARAKAT

1. Meningkatkan kinerja organisasi dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan
2. Pencapaian sasaran strategis Ditpolair Korpolaairud dalam peningkatan Penjagaan Harkamtibmas Di Wilayah Perairan
3. Meningkatnya kapabilitas, kinerja dan profesionalitas penegak hukum Ditpolair Korpolaairud
4. Terwujudnya Ditpolair Korpolaairud yang Presisi.

1. Sebagai wujud dan dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun Tol laut dan poros Maritim.
2. Adanya kebijakan yang tepat sasaran bersama dengan stakeholders eksternal untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Pantai & Nelayan
3. Asset Ekonomi perairan dilakukan untuk pemanfaatan nilai, meningkatkan penerimaan negara dan mencegah pemanfaatan oleh pelaku kejahatan maupun pihak lain serta untuk kepentingan umum atau negara.
4. Pencegahan Penyelundupan Narkoba Lewat Wilayah Perairan
5. Menjaga Kedaulatan perairan Indonesia dari ancaman Pihak Asing Yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia

1. Meningkatnya tata kelola yang ditandai dengan adanya ketertiban lingkungan Perairan dan ketenangan masyarakat
2. Terhindarnya Masyarakat dari ancaman bahaya Narkoba
3. Mewujudkan kepercayaan publik (trust building) dalam penegakan hukum di Wilayah Perairan
4. Meningkatkan Kamani bagi Masyarakat Pantai dan Nelayan

Output:

TERLAKSANANYA KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER DALAM BIDANG INTELIJEN UNTUK MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOBA

Outcome:

TERJADINYA KOLABORASI DALAM MENJAGA HARKAMTIBMAS DI PERAIRAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA BIDANG INTELIJEN ANTAR STAKEHOLDER



PENTAHAPAN JANGKA PENDEK (1)



KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1. PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan Formasi Team Efektifb. Penerbitan Sprin Team Efektif	Sprin Team Efektif	M3 SEPT 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli Aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektif
2. Menganalisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman Undanganb. Perumusan Draftc. Hasil & Rekomendasi Analisis	Surat Edaran Dirpolair	M4 SEPT 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli Aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektif
3. Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder (BNN,HUBLA)	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman Undangan Audiensib. Pelaksanaan Audiensic. Penyusunan Hasil /Risalah Audiensi	Hasil Risalah Audiensi	M1 OKT 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Polaird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektifg. Kepala BNN Jakuth. Kepala BNNP Jakartai. Hublaj. KPLP
4. Melakukan FGD dengan Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan Narkoba	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman undanganb. Penyiapan Sarana & Prasaranac. Pelaksanaan FGDd. Penyusunan Risalah hasil FGD	Risalah /Notulensi Audiensi	M2 OKT 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektifg. Kepala BNN Jakuth. Kepala BNN Jakartai. HUBLA



PENTAHAPAN JANGKA PENDEK (2)



KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
5. Melakukan Penyusunan Draft PKS antar Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan narkoba	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman Undanganb. Penyusunan & Pembahasan Draftc. Pengesahan Draft	Draft PKS	M3 OKT 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli Aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektifg. Kepala BNNP Jakarta
6. Penyusunan Draft Standar Operational Prosedur & Buku Panduan Untuk Skema koordinasi Antar Intelijen	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman Undanganb. Penyusunan Draft SOP	Draft SOP	M4 OKT - M1 NOP 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektifg. Kepala BNNP jAKARTA
7. Melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Intelijen di Korpolaairud	<ul style="list-style-type: none">a. Pengiriman Undanganb. Penyiapan Sarana & Prasaranac. Penyiapan Materid. Penyusunan Hasil /Risalah Sosialisasi	Hasil Risalah Sosialisasi	M2 NOP 2024	<ul style="list-style-type: none">a. Dirpolairb. Kasubdit Gakkum Polairc. Kasubdit Patroli aird. Kasubdit Intelaire. Staff Dit Intelairf. Team Efektif

IMPLEMENTASI PROPER





VIDEO IMPLEMENTASI PROPER

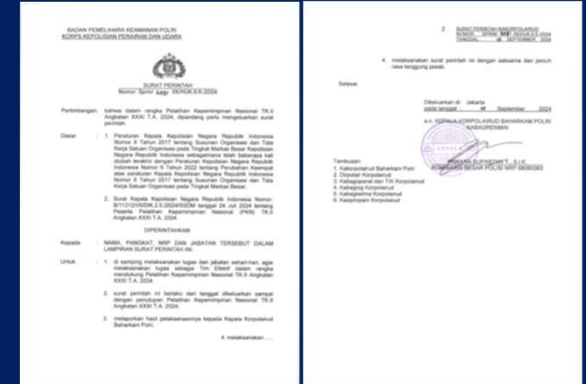
PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF(1)

M3 SEPT 2024

TUJUAN : Melakukan Pembentukan Team Efektif Untuk Membantu Project Leader Dalam implementasi Proper Khususnya di Jangka Pendek

OUTPUT : Sprin Team Efektif

EVIDENCE

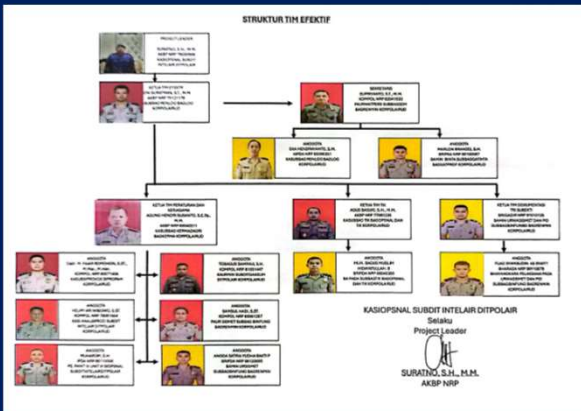


DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF DALAM RANGKA MENUNJUK PELATIHAN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	FUNGSIONAL	KEY
1.	SURATNO, S.H. M.M	KAPOL	KASIDIRNAS SUBDIT INTELAK BAHARRAM POLRI	PROJECT LEADER	1
2.	BENI SURATMAN, S.T. M.M	KAPOL	KORPOLASUB SUBSAGUM PALWIRAN TERES SUBSAGUM BAHARRAM POLRI	WITUS TIM EFEKTIF	2
3.	SUPRIYANTO, S.T. M.M	KORPOL	BAHARRAM POLRI	SEKRETARIS	3
4.	ERA HENDRYANTO, S.M	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	4
5.	MARLON BRANGG, S.H	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	5
6.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.H. M.M	KORPOL	BAHARRAM POLRI	TIM PELATIHAN DAN PELAKSANA	6
7.	CHAI M. FAJAR WIGANDHA, S.T. M.M. M.H.	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	7
8.	TOSMUS SARNYAS, S.H	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	8
9.	HELMIY ARI WIBOWO, S.ST	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	9
10.	SAMUS, HADI, S.ST	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	10

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF DALAM RANGKA MENUNJUK PELATIHAN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	FUNGSIONAL	KEY
11.	MUHAMMAD, S.H	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	11
12.	ANGGA SATRIA YUDHA BHAKTI P.	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	12
13.	ADUS BABUS, S.H. M.M	KORPOL	BAHARRAM POLRI	TIM TIM	13
14.	MAK BABUS SULIM HEATYATULLAH, S	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	14
15.	TRI SUBEKTI	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	15
16.	FIJAD SYAMSULHANS SYAFI	KORPOL	BAHARRAM POLRI	ANGGOTA	16



STRUKTUR ORGANISASI TEAM EFEKTIF



RAPAT TEAM EFEKTIF

SPRIN TEAM EFEKTIF

TUJUAN : Melakukan Analisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan Khususnya Dalam Kerjasama Intelijen

OUTPUT : Laporan Hasil Analisis Kebijakan

EVIDENCE



RAPAT ANALISIS KEBIJAKAN

ANALISA KEBIJAKAN DIRPOLAIR TENTANG PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN

KOLABORASI INTELIJEN UNTUK MENGECAH PENYELINDUPAN NARKOBA DALAM MENJAGA HARKANTRIMAS WILAYAH PERAIRAN

AKBP SURATNO, S.H., M.M. NRP 76030906

PETA PERAIRAN INDONESIA

KETERANGAN

- * Perairan Kepulauan & Pedalaman 3,1 Jt KM²
- ** Zona Tambahan 27988 KM²
- *** Laut Teritorial 23688 KM²
- **** Landas Kontinental 3.217 KM²
- ***** Pangea Cere Pangea 100 KM²

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (LAUT TERITORIAL PER. KEPULAUAN & PEDALAMAN) merupakan Wilayah Berdaulat Perairan Indonesia. WILAYAH NKRI BERDAKARAS DI NO.43 TH 2008 PUL. 1 ATAS 1 DAERAH BUKAN POLA: PP 25 TH 2007

LAPORAN HASIL ANALISIS

KUAT PERSONEL

SESUAI PERKAP No. 8 TH 2017

NO	JABATAN	CUKUP	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	PAMEN	70	36	KURANG 36 PERSONEL
2	PAMA	372	105	KURANG 267 PERSONEL
3	BINTARA	489	594	KELEBIHAN 105 PERSONEL
4	TAMTAMA	288	407	KURANG 82 PERSONEL
5	ADN	85	3	KURANG 82 PERSONEL
Jumlah Kekurangan		1.304	1.144	KURANG 160 PERSONEL

NO	JABATAN	CUKUP	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	PS. DAN KP	3		
2	PS. KKM	22		
3	PS. PANGOPS	14		
4	PS. PANGCALEK	2		
5	PS. PANAT	62		
6	PS. PATEK	55		
TOTAL		158		

NO	JABATAN	CUKUP	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	PAMEN	9	7	KEKURANGAN 2 PERSONEL
2	PAMA	3	3	Lengkap
3	BINTARA	13	36	KELEBIHAN 23 PERSONEL
4	TAMTAMA	13	86	KELEBIHAN 73 PERSONEL
5	ADN	0	1	KELEBIHAN 1 PERSONEL
Jumlah		38	133	KELEBIHAN 65 PERSONEL

PETA DISLOKASI KAPAL POLISI BULAN OKTOBER 2024

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

SURAT PERSETUJUAN DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Sehubungan dengan upaya Kolaborasi dalam menangani penyelundupan narkoba di wilayah perairan, pada prinsipnya saya menyetujui untuk dilaksanakan pembahasan secara kolaborasi dengan Kementerian / Kalebagan terkait guna membangun kesepakatan.

Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal: 10 Oktober 2024

HERI YENYUANTO BACHTIAR, S.I.K., M.S.
BANDIR JENDERAL POLISI

SURAT PERSETUJUAN DIRPOLAIRUD

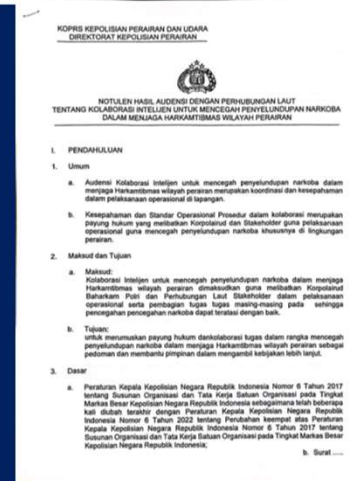
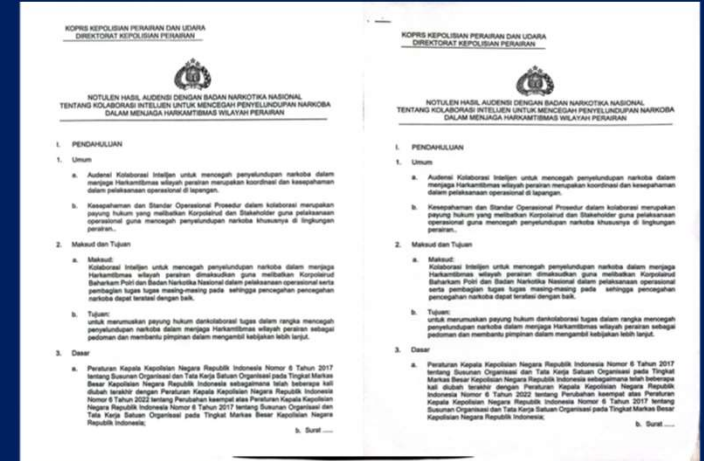
AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER(3)

M1 OKT 2024

TUJUAN : Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder Untuk Untuk Kerjasama Pengamanan Wilayah Perairan Khususnya Dalam Kerjasama Intelijen

OUTPUT : Notulensi Hasil Audiensi

EVIDENCE



AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER

NOTULENSI HASIL AUDIENSI



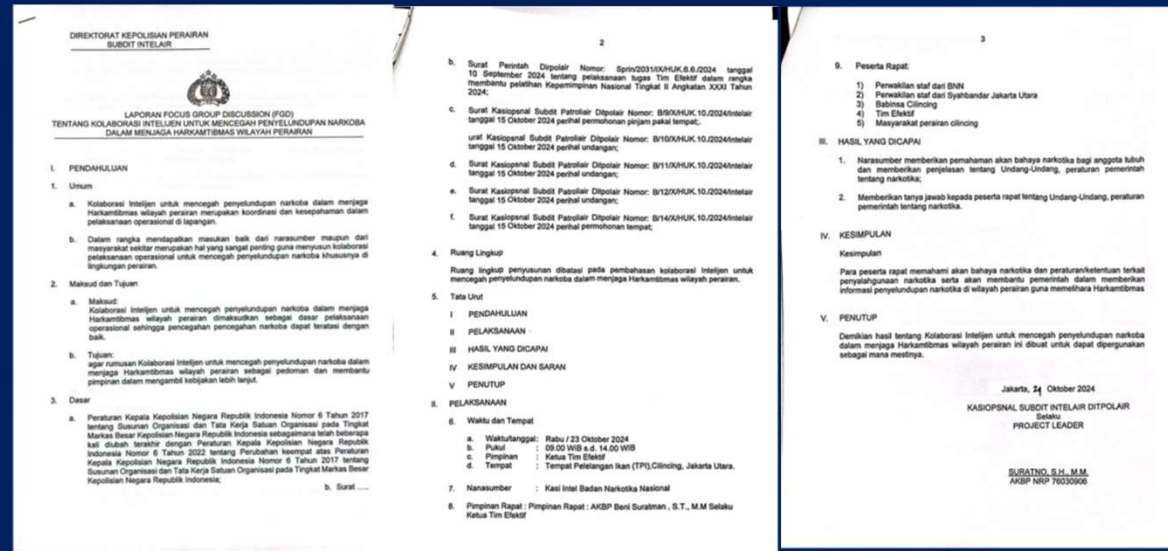
FGD DENGAN STAKEHOLDER(4)

M2 OKT 2024

TUJUAN : Melakukan FGD Dengan Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan Narkoba lewat Wilayah Perairan

OUTPUT : Notulensi Hasil FGD

EVIDENCE



FGD DENGAN STAKEHOLDER

NOTULENSI HASIL FGD

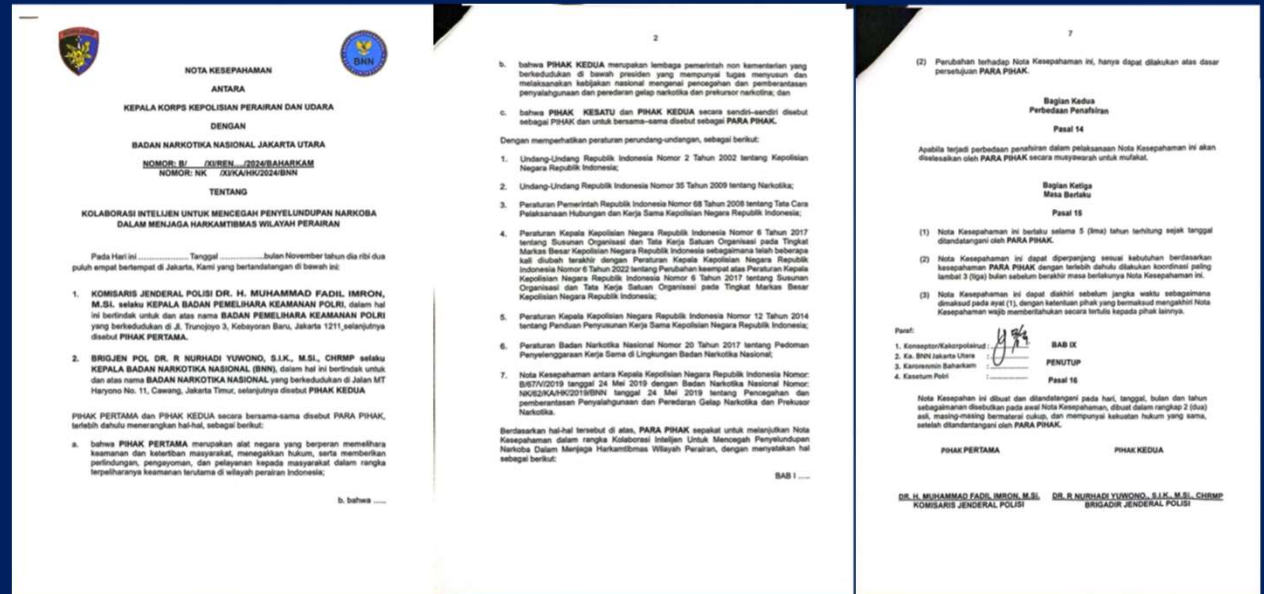
TUJUAN : Melakukan Penyusunan Draft PKS Dengan Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan Narkoba lewat Wilayah Perairan

OUTPUT : Draft PKS

EVIDENCE



RAPAT PEMYUSUNAN DRAFT PKS



DRAFT PKS



PENYUSUNAN DRAFT SOP (6)

M4 OKT - M1 NOP 2024

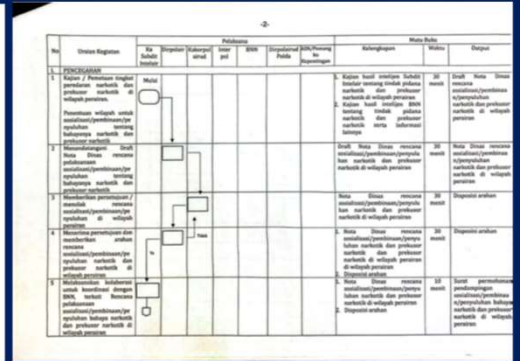
TUJUAN : Melakukan Penyusunan Draft SOP Dengan Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen Skema Koordinasi Penyelundupan Narkoba lewat Wilayah Perairan

OUTPUT : Draft SOP

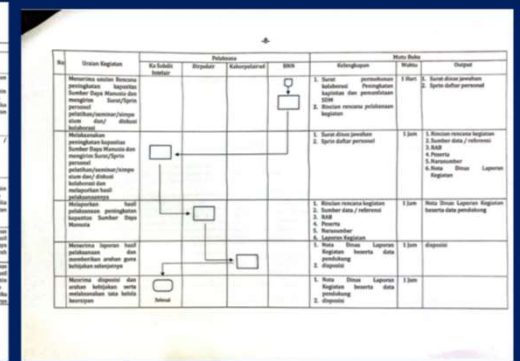
EVIDENCE



No	Uraian Kegiatan	Ka Subdi	Kategori	Waktu	Output
1	1.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
2	2.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
3	3.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
4	4.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
5	5.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP



No	Uraian Kegiatan	Ka Subdi	Kategori	Waktu	Output
1	1.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
2	2.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
3	3.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
4	4.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP
5	5.1. Menetapkan dan menetapkan prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyelundupan narkoba di wilayah perairan.	Subdi	Operasional	30 menit	Draft SOP

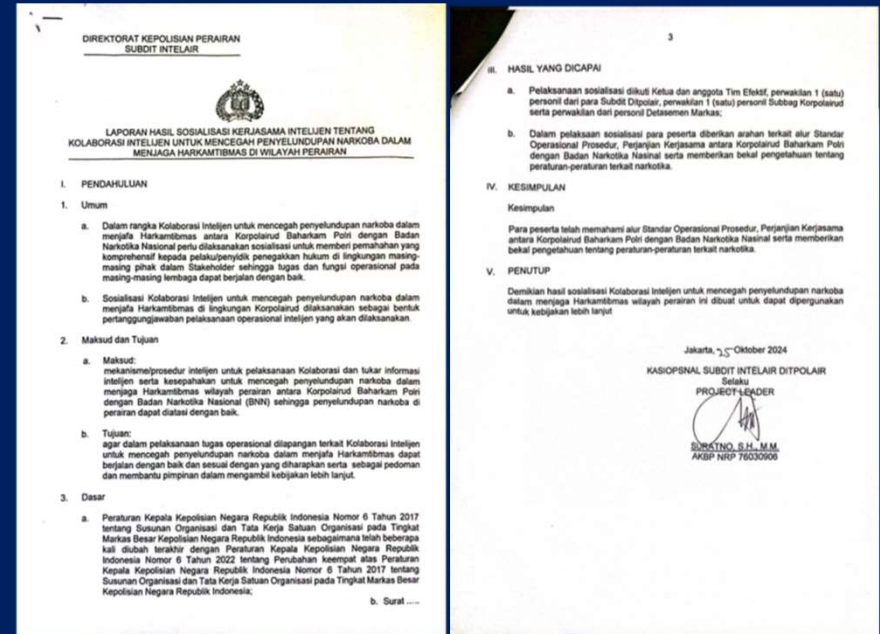


RAPAT PENYUSUNAN DRAFT SOP

Draft SOP Skema Koordinasi Penyelundupan Narkoba lewat

TUJUAN : Melakukan Sosialisasi Untuk Kerjasama Intelijen Skema Koordinasi Penyelundupan Narkoba lewat Wilayah Perairan
OUTPUT : Notulensi Sosialisasi

EVIDENCE



PELAKSANAAN SOSIALISASI

NOTULENSI HASIL SOSIALISASI

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS



**MELAKUKAN PEMBINAAN PADA
MASYARAKAT NELAYAN &
PESISIR PANTAI TENTANG
PENYELUNDUPAN NARKOBA
LEWAT PERAIRAN**



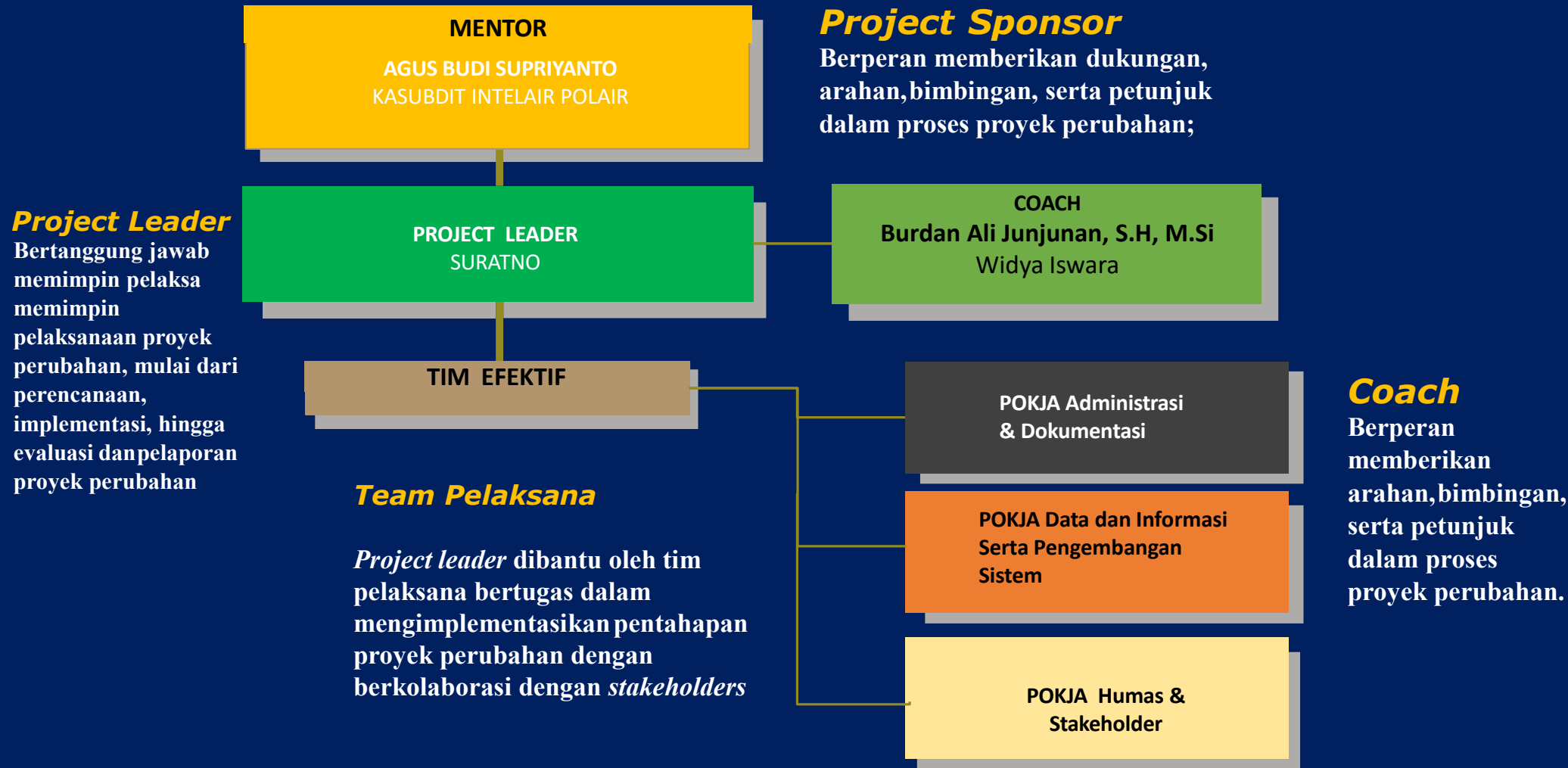
**MELAKUKAN FGD TENTANG
PENCEGAHAN
PENYELUNDUPAN NARKOBA
LEWAT PERAIRAN**



**MELAKUKAN KOMUNIKASI
DENGAN KOMINFO
PENCEGAHAN
PENYELUNDUPAN NARKOBA
LEWAT PERAIRAN**

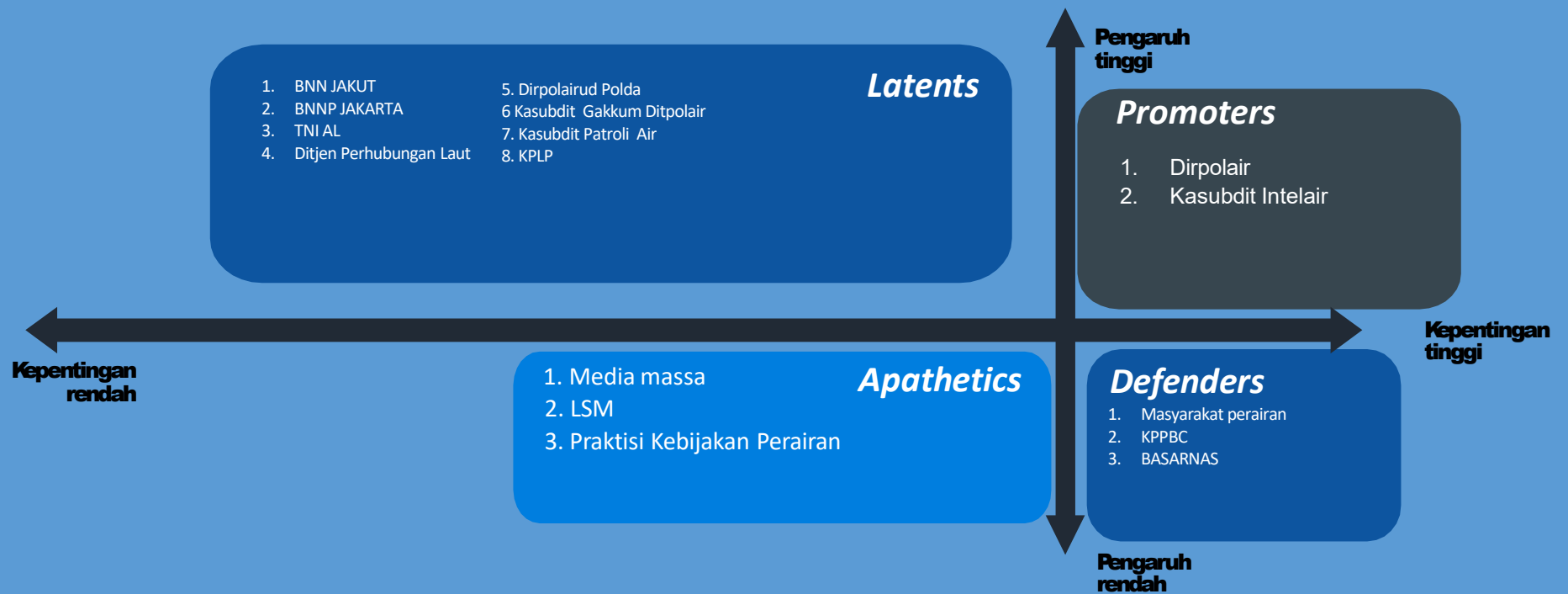


TATA KELOLA PROPER





PETA STAKEHOLDER





STRATEGI KOMUNIKASI RENCANA PROPER



KEEP SATISFIED

1. TNI AL
2. Dirjen Perhubungan Laut
3. Dirpoalirud POLDA
4. BNN JAKUT
5. BNN JAKARTA
6. KPLP
7. Kasubdit Gakkum Polair
8. Kasubdit Patroli air

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh *stakeholders* agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi yang reguler



MANAGE CLOSELY

1. Dirpolair
2. Kasubdit Intelair

Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan :

- Konsultasi secara reguler;
- Pelaporan secara reguler;
- Diskusi secara reguler;
- Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan
- Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan

MINIMAL REPORT

1. Media Massa
2. LSM
3. Praktisi Kebijakan Perairan

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan *stakeholders* agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman dengan koordinasi, kolaborasi, edukasi dan konsultasi

KEEP INFORMED

1. Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan
2. KPPBC

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat *stakeholders* terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan sosialisasi

01

Teknik



1. Tatap muka
2. Online Zoom
3. Dengan telepon/WA
4. Rapat koordinasi
5. Audiensi & Sosialisasi
6. Surat Menyurat

02

Media



1. Menggunakan modul paparan ppt baik secara softcopy maupun hard copy
2. Menggunakan video
3. Menggunakan surat resmi

03

Strategi



Landasan komunikasi :

1. *Transparansi & Accountable adalah nilai yang di kembangkan dalam Komunikasi*
2. *Inovativ dan Kolaboratif menjadi Landasan Dalam Komunikasi*
3. *Kolaborasi dalam mewujudkan Program pemerintah agar lebih efektif dan efisien*

04

Focus Stakeholder



1. Dirpolair
2. Kasubdit Intelair
3. TNI AL
4. Perhubungan Laut
5. Dirpoalirud Polda
6. Kepala BNNP JAKUT
7. Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan
8. KPLP
9. BNNP Jakarta
10. Media Massa
11. LSM
12. 3Praktisi Kebijakan Perairan

05

Jenis Stakeholderr



Promoter : Memberikan informasi Detail & melibatkan Secara Penuh Serta Melakukan Solusi

Defenders : Mengoptimalkan Keterlibatan dan menjelaskan Perkembangan Kegiatan

Latents : Menjelaskan manfaat, mendapatkan kepercayaan dan dukungan serta mengajak untuk terlibat.

Apathetic : Memberikan Informasi Kegiatan serta Penyebaran Informasi



STRATEGI MARKETING



01

Price



Biaya Pembuatan
Relative Terjangkau
Kolaborasi multi
pihak dalam rangka
pendanaan program/
kegiatan

02

Products



- SOP
- Sistem Inovasi
- Dokumen Kerjasama
- Peta kolaborasi

03

Promotion



Rapat koordinasi , rapat
sosialisasi untuk
membangun sinergi dan
kemitraan,
Pemanfaatan Sosial
Media

04

Place



- Korpolaairud
- Ditpolair
- Ditpolairud
Polda

05

Customer



1. Ditpolair
2. TNI AL
3. KPLP
4. BNN
5. Dirjen Perhubungan Laut

STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN DETAIL STAKEHOLDER

NO	STAKE HOLDER	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
A. STAKEHOLDER INTERNAL			
1	<u>Dirpoair</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
2	<u>Kasubdit Intelair Poalir</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan Serta Menyetujui Proper</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
3	<u>Kasubdit Patroliair</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
4	<u>Kasubdit Gakkum Polair</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
5	<u>Kasubdit Patroli Air</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
6	<u>Para Komandan Patroliair</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi</u>
7	<u>Dirpolairud Polda Seluruh Indonesia</u>	<u>Mengarahkan & Memberikan Dukungan</u>	<u>Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi</u>
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL			
1	<u>BNN Jakarta Utara</u>	<u>Komitmen Bersama & Kolaborasi</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
2	<u>Pimpinan KPLP (Hubla)</u>	<u>Mendukung Proper</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
4	<u>Media Massa</u>	<u>Mendukung Proper</u>	<u>Sosialisasi</u>
5	<u>BNNP JAKARTA</u>	<u>Komitmen Bersama & Kolaborasi</u>	<u>Audiensi, Laporan & Konsultasi</u>
6	<u>Praktisi Kebijakan Wilayah Perairan</u>	<u>Mendukung Proper</u>	<u>Koordinasi & Sosialisasi</u>
7	<u>Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan</u>	<u>Mendukung Proper</u>	<u>Sosialisasi</u>



SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDER

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Pusdikmin di Bandung, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KOMBES POL BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.
 JABATAN : KEPALA BNN JAKARTA UTARA
 INSTANSI : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bahwa untuk kepentingan institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan, maka dengan ini saya memberikan dukungan penuh atas proyek perubahan dengan judul "Kolaborasi Intelijen Untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba Dalam Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan" yang diajukan oleh:

NAMA : AKBP SURATNO, S.H., M.M.
 NRP : 76030906
 JABATAN : KASIOPSNAL SUBDIT INTELAIR
 INSTANSI : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Demikianlah pernyataan dukungan ini saya buat dengan sesungguhnya, semoga proyek perubahan ini akan banyak membawa manfaat untuk institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan guna mewujudkan Polri yang Presisi.

Jakarta, 14 Oktober 2024
 KEPALA BNN JAKARTA UTARA

[Signature]
 KOMBES POL BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.

BNN JAKARTA UTARA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang di diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Pusdikmin di Bandung, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : BRIGJEN POL. Dr. R. NURHADI YUWONO, S.I.K., M.Si, CHRMP.
 JABATAN : KEPALA BNN PROVINSI DKI JAKARTA
 INSTANSI : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bahwa untuk kepentingan institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan, maka dengan ini saya memberikan dukungan penuh atas proyek perubahan dengan judul "Kolaborasi Intelijen Untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba Dalam Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan" yang diajukan oleh:

NAMA : AKBP SURATNO, S.H., M.M.
 NRP : 76030906
 JABATAN : KASIOPSNAL SUBDIT INTELAIR
 INSTANSI : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Demikianlah pernyataan dukungan ini saya buat dengan sesungguhnya, semoga proyek perubahan ini akan banyak membawa manfaat untuk institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan guna mewujudkan Polri yang Presisi.

Jakarta, 14 Oktober 2024
 KEPALA BNNP DKI JAKARTA

[Signature]
 BRIGJEN POL. Dr. R. NURHADI YUWONO, S.I.K., M.Si, CHRMP.

BNN P DKI JAKARTA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Pusdikmin di Bandung, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IRJEN POL. Capt. HERMANTA, S.H., M.H., M.M., M.Mar.
 JABATAN : STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI PERHUBUNGAN
 INSTANSI : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa untuk kepentingan institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan, maka dengan ini saya memberikan dukungan penuh atas proyek perubahan dengan judul "Kolaborasi Intelijen Untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba Dalam Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan" yang diajukan oleh:

NAMA : AKBP SURATNO, S.H., M.M.
 NRP : 76030906
 JABATAN : KASIOPSNAL SUBDIT INTELAIR
 INSTANSI : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Demikianlah pernyataan dukungan ini saya buat dengan sesungguhnya, semoga proyek perubahan ini akan banyak membawa manfaat untuk institusi Polri khususnya Kepolisian Perairan guna mewujudkan Polri yang Presisi.

Jakarta, 14 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan

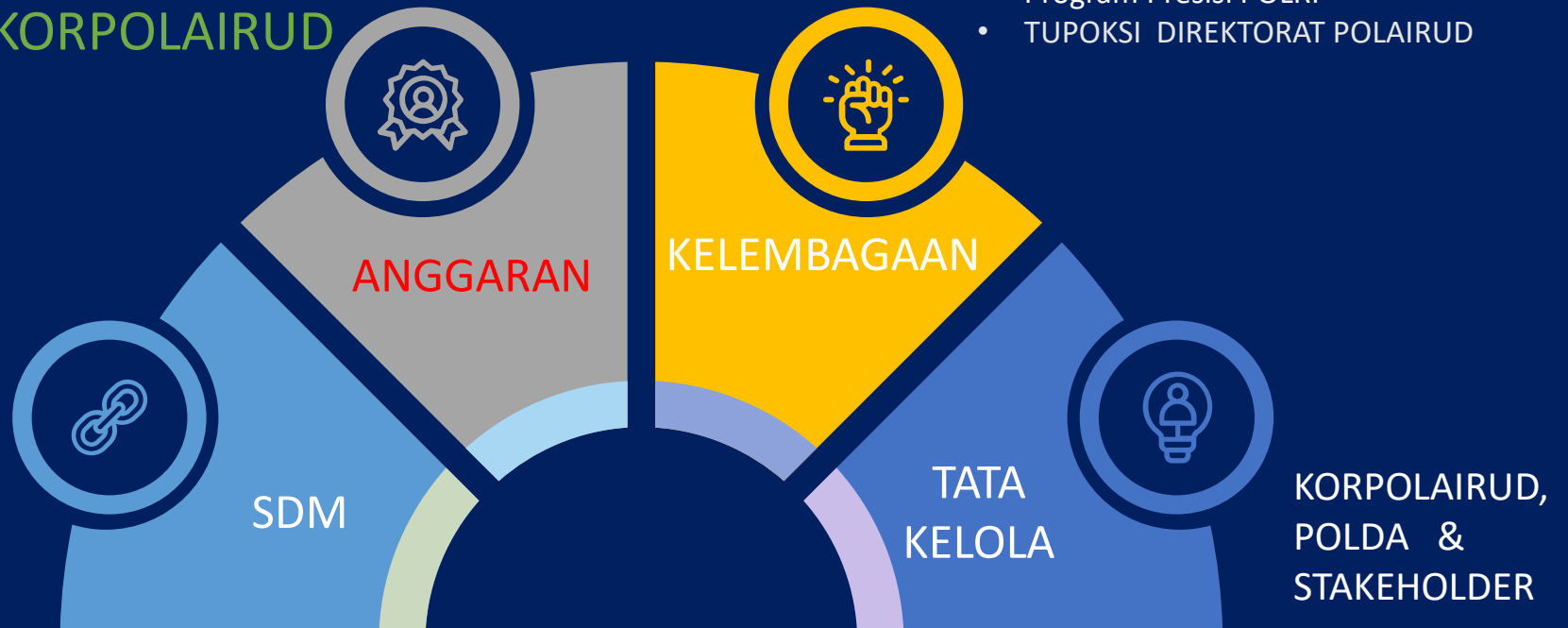
[Signature]
 Capt. HERMANTA, S.H., M.H., M.M., M.Mar.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DITJEN HUBLA

PETA SUMBERDAYA

- APBD
- APBN
- KORPOLAIRUD

- UU No. 12 Tahun 2022 Tentang POLRI
- PERKAP. NO. 06 TAHUN 2017, TENTANG SOTK MABES
- Program Presisi POLRI
- TUPOKSI DIREKTORAT POLAIRUD



- POLRI
- KORPOLAIRUD
- POLDA

KORPOLAIRUD,
POLDA &
STAKEHOLDER

KENDALA DAN SOLUSINYA

KENDALA



- Padatnya kegiatan Kepolisian beserta Stakeholders di tahun 2024 serta dalam kondisi Persiapan Pilkada
- Proyek perubahan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sedangkan perencanaan anggaran dilaksanakan satu tahun sebelumnya.
- Polri Fokus Pembenahan Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat

RESIKO



- Tim pelaksana tidak dapat melaksanakan pentahapan proyek perubahan secara optimal
- Proyek perubahan tidak tepat waktu dan aplikasi/platform tidak dapat digunakan
- Tidak adanya anggaran

SOLUSI



- Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini mendukung efektivitas dan efisiensi untuk transformasi Digital
- Mengoptimalkan rapat tatap muka dan Rapat Secara Virtual (Daring)
- Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat
- Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam sistem terpenuhi
- Menyiapkan SDM yang handal dan mempunyai pengalaman
- Project Leader memanfaatkan anggaran yang sudah ada untuk dioptimalkan atau mengalihkan atas anggaran yang lain
- Project leader berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mensponsori dan memberikan dukungan anggaran
- Mengusulkan anggaran pengembangan aplikasi pada T.A.2024 dan T.A 2025

KETERKAITAN PROPER & TEMA & POLICY BRIEF

PENGUATAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2029



TATA KELOLA
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN



PENGAMANAN WILAYAH
PERAIRAN DARI
PENYELUNDUPAN
NARKOBA



KEPEMIMPINAN
STRATEGIS DALAM
MENJAGA
HARKAMTIBMAS
WILAYAH PERAIRAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI/POTENSI DIRI

NO	KOMPONEN PERILAKU KEPEMIMPINAN	SUBKOMPONEN YANG PERLU PENGEMBANGAN	RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	RENCANA JADWAL PENGEMBANGAN (60 hari)
1	INTEGRITAS	Penyesuaian Terhadap Job Description	Analisis Tupoksi & Analisis Kebijakan Serta Pengakuan Etika & Integritas dalam Job Des	Oktober 2024
2	KERJA SAMA	Komunikasi Efektif	Pengorganisasian Team Efektif & Koordinasi Analisis Kebijakan Perselesaian Program	Oktober 2024
3	MENGELOLA PROPER	Efektivitas Kepemimpinan Strategis	Merumuskan Kebijakan Kolaboratif dalam Program Kerjasama Intelijen	Nopember 2024
4	PENGEMBANGAN SDM	Pengembangan Kompetensi Team efektif	Melaksanakan Analisis Kebijakan	Nopember 2024
5	KOLABORASI	Membangun Sinergitas Untuk Kebijakan Kolaboratif	Pembuatan Kebijakan & Penjelasan Ke Stakeholder Tentang Program Kerjasama Intelijen	Nopember 2024



MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER UNTUK SOLUSI PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA



MELAKUKAN ANALISIS TENTANG KONDISI WILAYAH PERAIRAN TERKAIT PENYELUNDUPAN NARKOBA



MELAKUKAN PEMBINAAN PADA TEAM EFEKTIF SEBAGAI PERWUJUDAN ORGANISASI PEMBELAJAR

- 1) **Pengembangan kepemimpinan Digital** : yaitu Transformasi kepemimpinan dari Kepeimpinan Konvensional ke Kepemimpinan Digital sesuai dengan Era Revolusi Industri 4.0
- 2) **Pengembangan sebagai agent perubahan** : Kepimpinan yang selalu melakukan perubahan dan inovasi terus menerus untuk keberlanjutan suatu organisasi.
- 3) **Pengembangan Kepemimpinan Strategis** : yaitu Pengembangan Kompetensi untuk melakukan perubahan pada isue isue Strategis dalam organisasi Korpolaairud.



KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Dengan Proper	Sumber Pembelajaran
Anti Narkoba	Materi pelatihan LAN	Pengambilan mata kuliah anti narkoba dikarenakan wilayah perairan rawan terhadap peredaran Narkoba sehingga perlu pemahaman tentang mekanisme peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba dan juga masuknya dari negara asing	Online Pimnas LAN, You tube, Literasi digital
Pengadaan Barang & Jasa	Materi Pelatihan LAN	Perencanaan & Pengadaan Barang Jasa karena pada proper akan dilakukan penguatan armada , sarana dan prasarana yang mendukung Patroli Air di wilayah perairan sehingga dibutuhkan mata pelatihan ini.	Online Pimnas LAN, You tube, Literasi digital
Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Materi Pelatihan LAN	Indonesia saat ini sedang mengembangkan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang hemat energi dan mempunyai keberlanjutan sehingga dibutuhkan agar ekonomi di kawasan maritim dapat terjaga dengan baik.	Online Pimnas LAN, You tube, Literasi digital

KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROPER



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
PKN Tk. II Angkatan XXXI T.A. 2024

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SURATNO, S.H., M.M.
Pangkat /NRP: AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 76030906
Jabatan : KASIOPSNAL SUBDIT INTELAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD
BAHARKAM POLRI
Instansi : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

2. Kepala Korpolaairud Baharkam Polri

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. YASSIN KOSASIH, S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla.
Pangkat /NRP: INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
Instansi : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa Proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam *milestone* jangka pendek yaitu pada bulan Oktober Tahun 2024 s.d. November 2024, jangka menengah yaitu bulan Desember Tahun 2024 s.d. bulan Mei 2025, dan jangka panjang mulai bulan Juni 2025 s.d. bulan Juni 2027.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekwensinya.

Peserta PKN Tingkat II

SURATNO, S.H., M.M.
AKBP/NRP 76030906

Jakarta, November 2024
Mengetahui
Kepala Korpolaairud Baharkam Polri

M. YASSIN KOSASIH, S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



KEBERLANJUTAN PROPER JANGKA MENENGAH & JANGKA PENDEK



KEGIATAN	WAKTU
1. Melaksanakan Pelatihan Kompetensi SDM Di Bidang Intelijen antar Stakeholder di Korpolaairud	JANUARI 2025
2. Melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Intelijen di Dirpoairud Seluruh Indonesia	MARET 2025
3. Melakukan Pengesahan Draft PKS & SOP Untuk Kerjasama Intelijen Pencegahan Penyelundupan Narkoba	APRIL 2025
3. Melaksanakan Pembentukan Posko Koordinasi Antar Stakeholder di Korpolaairud	MEI 2025
4. Patroli Bersama antar Stakeholder di Bidang Intelijen Wilayah Perairan Jakarta	JUN 2025

Jangka Menengah

KEGIATAN	WAKTU
1. Melaksanakan PKS antar Stakeholder Untuk Kerjasama Intelijen antar Stakeholder di Wilayah Dirpolairud Seluruh Indonesia	JULI 2025
2. Melaksanakan Pembentukan Posko Koordinasi Antar Stakeholder di Dirpolairud Seluruh Indonesia	SEPTEMBER 2025
3. Patroli Bersama antar Stakeholder di Bidang Intelijen Di Seluruh Perairan wilayah Indonesia	NOPEMBER 2025
4. Analisis & Evaluasi Kerjasama Bidang Intelijen untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba.	DESEMBER 2025

Jangka Panjang

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN



**KOLABORASI,
TRANSFORMASI
, BERMANFAAT**

KEPEMIMPINAN

Komunikasi Efektif dengan Stakeholder Untuk mengembangkan Kepentingan Nasional

INOVASI

Terbitnya SOP, PKS, Rancangan Program Kerjasama Intelijen serta Sistem Inovasi Strategi Kebijakan

KOLABORASI

Dukungan Semua Stakeholder Pada Proper Serta Komunikasi Yang Efektif

LEARNING ORGANIZATION

Pemberdayaan team & organisasi serta Peningkatan Kompetensi SDM

LESSON LEARNT



1. **Pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat dan berintegritas**
 2. **Pemimpin harus berwawasan inovatif dan Menjadi Agen Perubahan**
 3. **Pemimpin harus berkolaborasi dalam Pencapaian Tujuan Suatu Organisasi**
 4. **Komunikasi, Sinergitas dan Kolaborasi Merupakan Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan**
1. **Pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam menggerakkan semua sumberdaya untuk mencapai sasaran suatu organisasi**

PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)

KESIMPULAN

1. Tahapan Proyek Perubahan pada Jangka Pendek Berhasil Dilaksanakan semua.
2. Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Dukungan Skema Pencegahan Penyelundupan Narkoba
3. Proper Menghasilkan Draft SOP Serta Draft PKS
4. Proper akan terus dilanjutkan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang & Dilakukan Implementasi Kerjasama Antar Stakeholder Dalam Tindakan Pencegahan Penyelundupan Narkoba

SARAN

1. Perlunya membangun kesadaran semua Lembaga negara dalam Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan
2. Program yang telah dilaksanakan pada proyek perubahan agar dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan Stakeholder lainnya dan dapat diimplementasikan untuk Strategi Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perairan

REKOMENDASI

1. Perlunya pemerintah membuat kebijakan dalam pencegahan Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perairan
2. Perlu diperkuat armada , sarana & Prasarana pengamanan wilayah perairan untuk mencegah adanya penyelundupan Narkoba di wilayah perairan.



TERIMA KASIH